

EKSISTENSI BUDAYA POLITIK DI INDONESIA : SEBUAH KAJIAN**Dr. Thomas Tokan Pureklolon.**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan
 thomas.pureklolon@uph.edu

Abstract

Political culture is the pattern of individual behavior and orientation towards political life that is lived by the members of a system. Political culture is a citizen's perception that is actualized in the pattern of attitudes towards political problems and political events that occur so that it has an impact on the formation of the political structure and process of society and government because the political system is a relationship between humans which involves questions about rules, power, and also the authority they have. Thus the existence of political culture in Indonesia is very interesting to study. The method used in writing this journal is a qualitative method by conducting library research on political culture in Indonesia. The purpose of writing this journal is to describe the existence of political culture in Indonesia in accordance with the context, situation and objectives of political development in Indonesia.

Key Word: *Culture, government, politic, political culture, socialisation.*

Abstrak

Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota dari suatu sistem. Budaya politik merupakan persepsi warga negara yang diaktualisasikan dalam pola sikap terhadap masalah politik dan peristiwa politik yang terjadi sehingga berdampak terhadap pembentukan struktur dan proses politik. Masyarakat maupun pemerintahan karena sistem politik merupakan hubungan antar manusia yang menyangkut soal tentang aturan, kekuasaan, dan juga wewenang yang dimiliki. Dengan demikian eksistensi budaya politik di Indonesia sangat menarik untuk dikaji. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode kualitatif dengan melakukan riset kepustakaan tentang budaya politik yang ada di Indonesia. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mendeskripsikan eksistensi budaya politik di Indonesia sesuai dengan konteks, situasi dan tujuan pembangunan politik di Indonesia.

Kata Kunci : Budaya, pemerintahan, politik, politik budaya, sosialisasi.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan berbagai suku, ras, agama, kepercayaan, bahasa, dan lain sebagainya. Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat kaya akan budaya. Budaya adalah semua hal yang bersangkutan dengan akal. Budaya ini membentuk kepercayaan dan pola pikir masyarakat di daerahnya sedari dini. Hal ini

menyebabkan Indonesia memiliki pola pikir, kepercayaan, dan kebiasaan hidup yang berbeda-beda.

Partisipasi warga negara dalam kelompok masyarakat memiliki peran yang signifikan terhadap sistem politik suatu negara, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setiap warga negara dalam kesehariannya hampir selalu bersinggungan dengan aspek-aspek politik. Politik adalah kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Contohnya, warga Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat harus bekerja secara optimal sesuai dengan kemampuan dan cita-cita negara. Contoh lainnya, warga negara terkena dampak langsung dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh sebab itu, kehidupan warga negara setiap harinya tidak lepas dari politik.¹

Seringkali kita melihat warga Indonesia yang sedang melakukan pemilihan, baik pemilihan ketua RT/RW, kepala desa, calon gubernur, DPR, DPD, maupun pemilihan calon Presiden; Pada saat melakukan pemilihan tersebut, masyarakat menggunakan akal pikiran yang sehat. Namun, ada juga yang menggunakan ikatan historis dan primordialisme. Fakta politik itulah yang ada di masyarakat Indonesia sebagai sebuah identitas politik Indonesia.²

Di dunia politik, faktor budaya memainkan peran yang sangat penting dari masa ke masa. Alur kebijakan politik suatu bangsa ditentukan oleh sistem struktural pada masanya, salah satunya adalah oleh apa yang dikenal sebagai budaya politik. Bagaimana budaya politik memainkan peran yang sangat penting? Budaya politik adalah persepsi warga negara yang diaktualisasikan dalam pola sikap terhadap masalah politik dan peristiwa politik yang terjadi.³ Politik mencakup berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat, seperti keagamaan, kegiatan ekonomi, bisnis, hubungan internasional, serta hubungan sosial masyarakat. Konsep ini dapat pula berarti berbagai aspek kegiatan masyarakat mempengaruhi kebijakan politik. Maka dari itu, budaya politik dapat mempengaruhi kehidupan politik di Indonesia. Terdapat bermacam-macam budaya politik yang dianut masyarakat Indonesia untuk mengapresiasi cita-citanya. Budaya politik tersebut menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam kehidupan politik di Indonesia. Budaya politik

¹ Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta : PT. Grafindo Media Pratama, 2006), hlm. 2.

² Ibid., hlm. 3

³ Ibid., hlm. 4.

yang baik mampu mendorong partisipasi dari warga negara dalam keseluruhan kehidupan secara politik.⁴

Akan tetapi, masih sedikit masyarakat Indonesia yang memiliki budaya politik aktif, mayoritas bahkan tidak mengerti politik dikarenakan kondisi sosio-ekonomi yang kurang mendukung. Ada pula yang tidak peduli terhadap politik di Indonesia. Sekalipun masyarakat Indonesia terlibat aktif dalam aksi politik, hal itu dikarenakan adanya pengaruh *peer pressure*, Sangat sedikit masyarakat Indonesia yang betul-betul memahami situasi politik di Indonesia. Rendahnya partisipasi politik pada masyarakat Indonesia dapat disebabkan karena kurang memadainya tingkat sosialisasi budaya politik. Agar terciptanya budaya politik yang aktif maka harus di dukung oleh semua pihak terutama oleh pemerintah itu sendiri.

Dalam tulisan ini, penulis akan mengkaji mengenai pengertian budaya politik, jenis-jenis budaya politik di Indonesia, pengaruh budaya politik Indonesia terhadap sistem politik di Indonesia, serta cara meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap budaya politik.

DEFINISI BUDAYA

Kata budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *buddhayah*, *Buddhayah* ini merupakan bentuk jamak dari *buddhi*, yang berarti akal atau budi. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kebudayaan berarti semua hal yang bersangkutan dengan akal. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah.⁵

Dua Antropolog, yakni Kroeber dan Kluckhohn melakukan studi selama lebih dari 50 tahun dalam upaya mereka memetakan kebhinekaan pengertian budaya. Menurut mereka, terdapat enam pemahaman pokok mengenai budaya⁶, yakni:

1. Definisi deskriptif

Budaya adalah sesuatu yang menyusun keseluruhan hidup sosial dan dibentuk oleh beberapa bidang.

2. Definisi historis

⁴ Ibid., hlm. 5

⁵ Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), hlm. 321.

⁶ Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan* (Yogyakarta : Kanisius, 2005), hlm. 9.

Budaya adalah warisan yang dialih-turunkan dari generasi satu kegenerasi berikutnya.

3. Definisi normatif

Budaya adalah aturan atau jalan hidup yang membentuk pola-pola perilaku dan tindakan yang konkret.

4. Definisi psikologis

Budaya adalah alat untuk memecahkan masalah yang membuat orang dapat berkomunikasi, belajar, atau memenuhi kebutuhan material maupun emosionalnya.

5. Definisi struktural

Budaya adalah abstraksi yang berbeda dari perilaku konkret.

6. Definisi genetis

Budaya lahir dari interaksi antarmanusia dan tetap dapat bertahan karena ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Budaya bukanlah barang statis, melainkan sebuah determinan sekaligus sebuah produk dari interaksi sosial.⁷ Budaya dapat diubah oleh pelaku yang memiliki gagasan inovatif dan mendapat dukungan sosial masyarakat. Akan tetapi, dalam perkembangan budaya, selalu ada hambatan struktural yang membatasi ruang gerak.

DEFINISI POLITIK

Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis*, yang berarti kota atau negara kota. Politik mengandung pengertian adanya hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, yang menimbulkan adanya aturan, kewenangan, dan kekuasaan. Politik dalam bahasa Arab disebut *Siyasah* atau dalam bahasa Inggris disebut *politics*, yang berarti sebagai suatu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan.

Suatu masyarakat politik harus memiliki ciri-ciri sebagaimana diungkapkan oleh Robert E. Ward, yaitu sebagai berikut⁸.

1. Organisasi pemerintahan yang beranekaragam dan sistem fungsional yang spesifik
2. Kadar integrasi yang tinggi dalam struktur pemerintahan
3. Besarnya peranan prosedur-prosedur rasional dan sekuler dalam proses pengambilan keputusan politik

⁷ Bill Lidle, *Dari Columbus Untuk Indonesia: 70 Tahun Professor Bill Liddle dari Murid dan Sahabat* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), hlm. 25.

⁸ Aim Abdulkarim, loc. cit.

4. Deras, luas, serta tingginya efektivitas keputusan-keputusan politik dan administrasi
5. Meluas serta efektifnya rasa identifikasi rakyat terhadap sejarah, tanah air, dan kepribadian nasional negaranya
6. Luasnya minat dan partisipasi masyarakat pada sistem politik
7. Alokasi peranan-peranan politik yang didasarkan pada prestasi daripada kedudukan sosial
8. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan juridis dan peraturan umum yang didasarkan pada sistem hukum yang berlaku bagi semua orang.

DISKURSUS BUDAYA POLITIK

Telah dibahas sebelumnya bahwa masyarakat Indonesia memiliki keragaman budaya yang unik. Kedua unsur budaya dan politik membentuk budaya politik. Konsep budaya politik dikaji oleh beberapa tokoh. Definisi mereka terhadap konsep budaya politik adalah sebagai berikut.

- Austin Ranney
Menurut Austin Ranney, budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama. Ia juga mengartikan budaya politik sebagai sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.
- Gabriel A. Almond dan G.Bingham Powell, Jr.
Menurutnya, budaya politik adalah sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.
- Sidney Verba
Menurut Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekskpresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.
- Mochtar Massoed
Menurut Moctar Massoed, pengertian budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.
- Rusadi Kantaprawira

Pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

- Miriam Budiardjo

Menurut Miriam Budiardjo, budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola- pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya.

Pada masyarakat politik melekat budaya-budaya politik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Budaya politik dalam suatu negara terbagi berdasarkan 2 golongan, yakni masyarakat jelata dan elit politik. Budaya politik melekat baik pada masyarakat dengan sistem politik tradisional, transisional, maupun modern.⁹

Dari pendapat tokoh-tokoh, dapat ditarik garis merah bahwa budaya politik merupakan persepsi warga negara yang diaktualisasikan dalam pola sikap terhadap masalah politik dan peristiwa politik yang terjadi sehingga berdampak terhadap pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintahan karena sistem politik merupakan hubungan antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan, dan wewenang.¹⁰ Budaya politik diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat secara sadar untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan kolektif dan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Secara sederhana, pengertian budaya politik adalah nilai-nilai yang berkembang dan dipraktikan suatu masyarakat tertentu dalam bidang politik.

Budaya politik merujuk pada orientasi dan tingkah laku individu dan masyarakat terhadap sistem politik. Orientasi politik tersebut terdiri dari 2 tingkat, yakni di tingkat masyarakat dan tingkat individu. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Menurut Almond dan Verba, masyarakat mengidentifikasi dirinya dengan simbol-simbol lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang dimilikinya. Menurut Almond dan Powel, orientasi individu terhadap sistem politik mencakup tiga aspek yaitu¹¹:

- Orientasi kognitif

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ R. Siti Zuhro, *Demokrasi Lokal: Pembinaan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali* (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 10.

Budaya politik mencakup pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. Misalnya: tingkat pengetahuan seseorang mengenai sistem politik, tokoh pemerintahan dan kebijakan yang mereka ambil, simbol-simbol kenegaraan, dan lain-lain.

- Orientasi afektif

Budaya politik mencakup aspek perasaan dan emosional seorang individu terhadap sistem politik. Hal ini menyoroti perasaan keterlibatan, keterikatan, ataupun penolakan.

- Orientasi evaluatif

Budaya politik penilaian seseorang terhadap sistem politik, menunjuk pada komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan politik terhadap kinerja sistem politik.

Selain memiliki 3 aspek, budaya politik juga mencakup beberapa ciri-ciri, yakni adanya pengaturan kekuasaan, adanya perilaku dari aparat-aparat negara, adanya proses pembuatan kebijakan pemerintah, adanya kegiatan partai-partai politik, adanya gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah, mencakup mengenai pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat, serta mencakup masalah legitimasi.

Budaya politik jika dilaksanakan dalam ketentuan-ketentuan yang benar akan berdampak terhadap berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan dan lain-lain¹²:

1. Dampak budaya politik terhadap perekonomian

Budaya memiliki peranan yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara karena terkait dengan pembentukan *trust* di dalam kelompok. Indonesia mempunyai tingkat heterogenitas yang tinggi sehingga di dalam kehidupan perekonomian akan membutuhkan biaya transaksi yang ditanggung oleh masyarakat karena adanya perbedaan budaya tersebut.

2. Budaya Politik Terhadap Pendidikan

Budaya politik terhadap pendidikan dapat diatasi dengan pendidikan yang formal maupun nonformal, maka pemikiran seseorang dapat menjadi lebih terbuka dan lebih toleran terhadap perbedaan.

¹² Adji Pratikto, *Pengaruh Budaya Terhadap Kinerja Perekonomian*, Portal Garuda, diakses dari <http://download.prtalgaruda.org/article.php?article=14120&val=951>), pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 11.43.

Untuk mengetahui karakter budaya politik suatu bangsa, dapat diukur melalui beberapa hal, yakni¹³:

- Tingkat pengetahuan umum masyarakat mengenai sistem politik negaranya. Contohnya pengetahuan tentang sejarah, letak geografis, dan konstitusi negara.
- Pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan.
- Pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang mencakup opini atau pendapat dari masyarakat dan media massa kepada pemerintah.
- Seberapa besar tingkat partisipasi politik warga masyarakat serta sejauh mana pemahamannya tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Nilai-nilai dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh suku, budaya, dan keyakinan setempat. Tak dapat dipungkiri suku Jawa berperan signifikan dalam dunia politik di Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia adalah suku Jawa dan semua presiden yang menang pemilu berasal dari suku Jawa. Oleh sebab itu, budaya Jawa sangat mempengaruhi budaya politik di Indonesia. Berikut dibahas mengenai hal-hal penting dalam sebuah politik berdasarkan persepsi budaya Jawa dibandingkan persepsi budaya barat¹⁴.

1. Kekuasaan

Menurut budaya barat, kekuasaan adalah hal yang abstrak dan kasat mata. Seseorang dikatakan memiliki kekuasaan jika perintahnya ditaati oleh orang lain. Dalam pengertian ini, pemerintah memiliki kekuasaan karena peraturan pemerintah wajib ditaati. Kekuasaan dapat bersumber dari kekayaan, relasi, status sosial, struktur formal, organisasi, populasi jumlah, dan senjata. Tidak ada batas akumulasi kekuasaan dan kekuasaan itu ambigu secara moral.

Persepsi budaya Jawa mengenai kekuasaan sangat bertentangan dengan persepsi budaya barat. Menurut budaya Jawa, kekuasaan adalah suatu hal yang konkrit seperti energi mahakuasa yang diwujudkan dalam benda natural seperti batu, pohon, dan sebagainya, yang diwariskan turun temurun. Selain itu, kekuasaan bersifat homogen dan

¹³ R. Siti Zuhro, op.cit hlm. 15.

¹⁴ Benedict R. OG Anderson, *Language and Power* (USA: Equinox Publishing, 2006), hlm. 32.

berasal dari sumber yang sama. Kekuasaan bukan berasal dari struktur kelembagaan, kekayaan, senjata, atau hal duiawi lainnya. Kekuasaan itu bersifat terbatas, jika kekuasaan wilayah A bertambah, maka kekuasaan wilayah B akan berkurang. Dan terakhir, terdapat batas yang jelas antara kekuasaan yang bersifat baik dan jahat.

2. Kekuasaan dalam Sejarah

Dunia barat memandang sejarah sebagai sebuah pola linier yang saling berkaitan satu sama lain. Sementara itu, masyarakat Jawa cenderung melihat kekuasaan sebagai sebuah siklus yang berulang, yakni dari zaman keemasan (*Krtayuga*) menuju pada zaman kemunduran (*Tretayuga*) menjadi zaman edan (*Kaliyuga*) hingga akhirnya roda berputar dan zaman keemasan (*Krtayuga*) kembali. Persepsi ini menunjukkan bahwa sebuah kekuasaan itu terbatas, dimana ada masa konsentrasi kekuasaan dan ada masa difusi.

3. Kesatuan dan Pusatnya

Budaya Jawa memandang kekuasaan tidak boleh terpecah-pecah baik itu pemegangnya maupun lokasinya. Ada kemungkinan hal ini menjadi salah satu pertimbangan Sukarno saat ia mengembalikan Indonesia menjadi bentuk NKRI alih-alih serikat. Demikian pula ada kemungkinan hal ini mendasari dilakukannya sumpah pemuda yang mempersatukan seluruh Indonesia.

4. Pemegang Kekuasaan

Dalam tradisi Jawa, biasanya pemegang kekuasaan berlatar belakang dari orang sederhana yang menjadi luar biasa karena ditempa waktu dan pengalaman. Mereka memiliki sebuah benda sakti atau mewarisi garis keturunan dari penguasa sebelumnya. Budaya paternalisme dalam masyarakat Jawa sangat kuat, oleh sebab itu biasanya kekuasaan dipegang oleh laki-laki dan garis keturunan laki-laki lebih dominan.

Selain suku, budaya politik juga dipengaruhi oleh nilai agama. Agama mayoritas di Indonesia tentunya adalah Islam. Berdasarkan agama Islam, kekuasaan tertinggi ialah kekuasaan Allah, sementara manusia sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Titik pangkal pengertian Islam mengenai kekuasaan dan wewenang manusia bermula pada pernyataan "*la ilaha illallah*" yang artinya "Tiada Tuhan selain Allah." Berdasarkan Al-

Qur'an surat al-Maidah ayat 17, "dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." dan surat Ali 'Imran ayat 26 yang berkata, "Katakanlah (Muhammad), 'Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.'" Maksud dari ayat-ayat tersebut adalah tidak ada siapa pun yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah SWT dan tidak ada manusia yang bisa mempunyai kekuasaan atau wewenang atas manusia yang lain, kecuali perintah dari Allah SWT.

Tugas manusia di dunia hanyalah untuk menaati dan menjalankan perintah-perintah Allah SWT, seperti yang tercantum pada surat Al-Hajj ayat 41, "(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan." yang menjelaskan bahwa kekuasaan dan wewenang yang manusia miliki hanya bertujuan untuk satu fungsi, yaitu menaati dan menjalankan perintah-perintah-Nya¹⁵.

Ketika agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 - 16, nilai-nilai agama Islam dapat diterima dengan cepat oleh masyarakat setempat hingga akhirnya menjadi agama mayoritas. Hal ini dapat dikarenakan nilai-nilai agama Islam itu sendiri sebenarnya tidak berbeda jauh dengan nilai tradisional budaya Jawa¹⁶. Selain itu, wali yang menyebarkan agama Islam juga menggunakan media wayang, gamelan, dan sebagainya. Sejak masa kerajaan hingga sekarang, atribut Islam digunakan oleh pemegang kekuasaan.

Selain agama, kemajuan teknologi dan Informasi yang pesat pada abad ke-21 ini yang dirasakan oleh seluruh kelas masyarakat turut membentuk budaya politik. Kemajuan ini berdampak positif dan negatif pada seluruh aspek kehidupan. Dampak positif dalam budaya politik adalah masyarakat dapat mengakses informasi seputar politik dengan mudah. Tidak hanya mengenai isu politik lokal, masyarakat juga mengetahui isu politik di luar negeri. Hal ini membuat masyarakat semakin *melek* politik. Di samping itu,

¹⁵ Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 126 (hal. 55), Al-Maidah ayat 17 (hal. 118), dan Al-Hajj ayat 41 (hlm. 380) (Jakarta: Jabal)

¹⁶ Benedict R. O'G Anderson, op. cit. hlm. 34.

kemajuan teknologi meningkatkan transparansi pemerintahan. Melalui sistem *online*, riwayat pembukuan keuangan lebih terkontrol dan diharapkan tingkat korupsi pun menurun¹⁷.

Namun, kemajuan ini juga memiliki efek negatif. Karakteristik informasi yang menyebar luas dan cepat melalui dunia maya sangatlah beragam. Hal ini menyebabkan pemerintah lokal sulit untuk menjaga informasi yang bersifat ‘rahasia’, contohnya soal Ujian Negara. Selain itu, banyak informasi beredar belum tervalidasi dan bersifat *hoax* baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sayangnya, masyarakat Indonesia belum memiliki sikap yang selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi melalui dunia maya. Mereka juga tidak sadar dampak besar yang dapat ditimbulkan oleh kelalaian tersebut.

Contoh konkrit dari efek kemajuan teknologi dan informasi ini adalah kasus “Penistaan Agama Islam oleh Ahok” yang disebabkan video Basuki Tjahaja Purnama yang berkomentar mengenai ayat Al- Quran diunggah ke media sosial dan dalam waktu singkat menjadi sorotan masyarakat di Indonesia dan dunia. Hampir seluruh rakyat Indonesia mengetahui situasi tersebut dan banyak pesan-pesan beredar melalui media sosial, baik itu yang benar maupun *hoax*.

Kemudian, kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia yang cukup tajam juga membentuk diskursus budaya politik. Di kota Jakarta saja, dengan pengamatan sekilas dapat dilihat gedung-gedung tinggi dan megah yang berdiri menutupi perumahan kumuh. Beberapa anak bersekolah di tempat mewah, sementara masih banyak yang tidak dapat sekolah karena harus mencari uang. Padahal, Jakarta adalah Ibu Kota negara Indonesia yang pastinya mendapat perhatian lebih dibandingkan kota di luar pulau Jawa. Terjadi kesenjangan yang sangat hebat dalam pengetahuan dan partisipasi politik antara warga yang berlatar belakang sosial-ekonomi kaya dibanding mereka yang miskin.

BUDAYA POLITIK DAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Masyarakat Indonesia memiliki beragam budaya politik. Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Budaya politik di Indonesia terbagi menjadi budaya politik

¹⁷ Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 16.

yang dimiliki oleh elit politik dan yang dimiliki oleh kaum rakyat umum, hal ini akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Jenis-jenis budaya politik di Indonesia adalah sebagai berikut.

4.1. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial adalah budaya politik dengan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah. Partisipasi politik bersifat kedaerahan, dalam masyarakat tradisional, sederhana, dan bersifat parokial. Sifat parokial ini disebabkan terbatasnya perbedaan antara warga negara sehingga tidak terdapat peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri¹⁸. Moctar Masoed dan Colin Mc. Andrew berpendapat bahwa budaya politik parokial adalah orang-orang yang tidak mengetahui sama sekali adanya pemerintahan dan politik. Pada budaya politik ini, anggota masyarakat cenderung tidak berminat terhadap objek-objek politik yang luas, kecuali dalam batas tertentu, yaitu terhadap tempat dia tinggal. Budaya politik ini sangat menonjolkan kesadaran warganya akan adanya pusat kewenangan atau kekuasaan politik dalam masyarakat.

Budaya politik ini memiliki ciri-ciri: apatis, lingkungannya sempit dan kecil, pengetahuan politik rendah, masyarakatnya yang sederhana dan tradisional, adanya ketidakpedulian dan juga penarikan diri dari kehidupan politik, anggota masyarakat condong tidak berminat terhadap objek politik yang luas, kesadaran mengenai adanya pusat kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakat rendah, tidak ada peranan politik bersifat khusus, warga negara tidak sering terlibat dalam sistem politik.

4.2. Budaya Politik Kaula/Subjek

Budaya politik kaula adalah budaya politik dengan masyarakat yang memiliki minat, perhatian, dan kesadaran terhadap sistem politik secara keseluruhan, serta mengalami kemajuan dalam sosial dan ekonomi, akan tetapi masyarakat pasif dalam memberikan masukan terhadap sistem politik¹⁹. Masyarakat hanya menerima kebijakan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintahan dan mematuhi undang-undang. Masyarakat tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan.

Ciri-ciri budaya politik ini adalah : masyarakat menyadari sepenuhnya otoritas pemerintah, hanya sedikit warga memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah,

¹⁸ Aim Abdulkarim, loc. cit.

¹⁹ Aim Abdulkarim, loc. cit.

warga dapat menerima apa yang berasal dari pemerintah, warga menerima putusan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dikoreksi atau ditentang, dan sikap warga sebagai aktor politik adalah pasif.

4.3. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan ini ditandai oleh adanya kesadaran politik di masyarakat disertai kesadaran untuk berperan aktif dalam suatu proses politik. Masyarakat tidak menerima langsung keputusan politik, karena merasa sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik yang memiliki hak dan tanggung jawab.²⁰ Umumnya masyarakat budaya politik partisipan sadar bahwa meskipun partisipasi mereka dalam sistem politik kecil, tetapi sangat berarti untuk keberlangsungan sistem politik.

Ciri-ciri budaya politik partisipan adalah warga menyadari hak dan tanggung jawabnya dan dapat mempergunakan hak serta menanggung kewajibannya, tidak begitu saja menerima kebijakan politik tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran, warga dapat menolak menurut penilaiannya sendiri, serta menjadi warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis.

Akan tetapi, jika dilandaskan dengan tujuan yang mementingkan diri sendiri atau kelompok, budaya politik partisipan dapat menumbuhkan moralitas bangsa. Berdasarkan suatu penelitian tentang partisipasi politik di berbagai negara yang dilakukan Samuel P. Huntington, kegiatan utama partisipasi politik sebagai berikut²¹.

- Kegiatan pemilihan seperti dalam pemilu, sumbangan untuk kampanye, mencari dukungan, serta suatu tindakan yang bertujuan mempengaruhi proses pemilihan.
- *Lobbying* mencakup upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintahan dan pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah orang.
- Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintahan

²⁰ Aim Abdulkarim, loc. cit.

²¹ R. Siti Zuhro, op.cit., hlm. 13.

- Mencari koneksi, yakni tindakan seseorang yang ditujukan kepada pejabat pemerintahan dengan maksud memperoleh manfaat.

Dari ketiga budaya politik yang ada di Indonesia tersebut, biasanya budaya politik parokial dan kaula disatukan sehingga terdapat dua macam budaya politik secara umum. Perbedaan yang nyata antara dua budaya politik ini sebagaimana diungkapkan oleh E. S. Fatah, yakni sebagai berikut.²²

Tabel 1. Perbedaan Budaya Politik Parokial-Kaula dan Budaya Politik Partisipan

Budaya politik Parokial-Kaula	Budaya Politik Partisipan
Loyalitas sentimental	Kalkulasi
Kultus	Pertimbangan
Pengabdian	Transaksi
Emosional-irasional	Rasional
Hierarki	Keselarsan
Wali	Mendataris
Dukungan	Pertanggungjawaban
Mobilisasi	Partisipasi
Marah	Melawan

Budaya politik juga dapat dikelompokkan berdasarkan sikap yang ditunjukkan elit politik. Sikap merupakan salah satu alat ukur untuk menilai adanya jiwa kerja sama serta keturutsertaan dalam sesuatu terhadap orang lain. Sehingga, jika dilihat dari sikap yang ditunjukkan, maka terdapat 2 tipe budaya politik yakni budaya politik militant dan budaya politik toleransi²³

- Budaya politik militan

Budaya politik militant adalah sebuah budaya politik dimana peraturan ataupun kebijakan yang sudah dibuat dianggap tidak pernah dan tidak mungkin salah dan sangat wajib dipatuhi. Sehingga, jika terdapat perbedaan, maka dianggap sebagai suatu usaha

²² Aim Abdulkarim, op. cit. hlm. 4.

²³ R. Siti Zuhro, op. cit. hlm. 4-5.

yang tidak benar dan menentang. Perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif.

- Budaya politik toleransi

Budaya politik toleransi adalah budaya politik yang berasaskan keterbukaan pikiran untuk bekerja sama, bersikap netral maupun kritis terhadap ide yang lain, namun tidak curiga kepada orang lain. Sehingga, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk bebas mengkritik kebijakan. Perbedaan dianggap hal yang umum ditemui dan merupakan hal yang membangun. Sehingga, budaya politik ini sangat sesuai untuk diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Sedangkan jika dikelompokkan berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan dapat terbagi atas dua yaitu budaya politik yang memiliki sikap absolut dan budaya politik yang memiliki sikap mental akomodatif²⁴.

- Budaya politik dengan sikap mental absolut

Budaya politik yang dengan sikap mental absolut dapat berasal dari tradisi. Tradisi selalu dipertahankan, maka dari itu lahirlah sikap absolut yang tidak memungkinkan pertumbuhan unsur yang baru. Sikap absolut berarti nilai-nilai dan kepercayaan yang ada dianggap sempurna dan tidak dapat diubah lagi. Budaya politik dengan sikap mental akomodatif

- Bentuk politik dengan sikap mental akomodatif

Bentuk budaya politik dengan mental akomodatif adalah budaya politik yang terbuka dan bersifat menerima perubahan yang dianggap signifikan dan membangun. Perubahan dianggap sebagai suatu usaha ke arah yang lebih baik, dan menyempurnakan yang sudah ada. Sikap seperti ini dapat menyesuaikan tradisi dengan perkembangan masa kini dengan tetap kritis terhadap perubahan yang ada.

PERAN PEMERINTAH DALAM KONSTRUKSI BUDAYA POLITIK INDONESIA

Politik memerlukan sosok pemimpin yang dapat memberikan panutan dan bimbingan menuju kestabilan dan kemakmuran. Contoh sosok pemimpin yang melakukan perubahan besar politik adalah Sukarno, Hatta, Suharto, Sudirman, Natsir, Gandhi, Nehru, Gorbachev, Mussolini, Hitler, Stalin, dan Karol Jozef Wojtyla. Kebijakan yang

²⁴ Ibid

diambil oleh para pemimpin tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya mereka. Menurut Bill Liddle dan Harry Benda, selain dari latar belakangnya sendiri, kebijakan yang diambil pemimpin politik juga dibatasi oleh hambatan struktural, yakni budaya masyarakat dan situasi politik. Para pemimpin politik hanya menjadi sebuah bagian kecil dalam interaksi golongan-golongan, partai, atau perwujudan dari budaya tempat mereka berada²⁵. Contohnya pada peristiwa revolusi 1945, Sukarno dan sekumpulan elit di sekelilingnya memilih untuk mendinginkan dan menunda gerakan revolusi pemuda. Menurut J.D. Legge, Sukarno sangat dipengaruhi oleh motif budaya Jawa²⁶. Liddle menekankan bahwa seorang pemimpin dapat dikekang oleh struktur budaya di sekitarnya, namun ia juga dapat memanfaatkan budaya tersebut sebagai alat politis. Contohnya pada masa pemilu 2014, Jokowi berhasil memenangkan suara rakyat melalui metode politiknya yang *blusukan* dan mementingkan kerja keras, transparan, jujur yang diungkapkannya dalam *Nawa Cita*. Rakyat akan memilih pemimpin yang mewakili budaya mereka. Hal ini berkaitan dengan aiasan presiden terpilih pemilu selalu berlatar belakang suku Jawa.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, budaya politik Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Terjadi efek beruntun antara nilai-nilai dalam masyarakat yang mempengaruhi latar belakang elit pemerintahan (terutama presiden) yang kebijakannya akan mempengaruhi budaya politik dalam masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, di bawah ini dibahas mengenai perkembangan budaya politik sebelum dan pada masa Orde Reformasi.

DINAMIKA BUDAYA POLITIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI

Budaya Politik Indonesia Sebelum Orde Reformasi

Pada masa perjuangan kemerdekaan 1945, terlihat mayoritas masyarakat Indonesia memiliki budaya politik parokial karena akses informasi politik yang ditekan oleh kaum penjajah. Namun, kelompok pejuang kemerdekaan memiliki budaya politik partisipan dan aktif dalam mencari tahu kabar perang dunia serta berusaha mencari kesempatan untuk memerdekakan diri. Meskipun pemerintah Jepang bersikap militan, namun

²⁵ Bill Lidle, loc.cit.

²⁶ Legge, J.D., *Sukarno : A Political Biography*, Singapore: Archipelagi Press, 2003, hlm. 58.

kelompok terpelajar tersebut melawan dan berhasil membawa Indonesia pada kemerdekaan.

Di masa orde lama, hanya segelintir orang yang terlibat aktif dalam politik. Sistem teknologi pun belum berkembang pesat sehingga berita sangat sulit dan membutuhkan waktu lama untuk disebar. Mayoritas masyarakat memiliki budaya politik parokial-kaula karena banyak yang belum *melek* politik. Selain itu, pemerintahan Sukarno bersifat militan.

Pada akhir masa orde lama, terjadi peristiwa bersejarah G30S yang memberikan noda gelap pada sejarah Indonesia. Terjadi kudeta berdarah yang berujung pada penggulingan Soekarno dari kursi kepresidenan dan dibubarkannya serta ditolaknya ideologi komunis di Indonesia. Masih belum pasti siapa dalang kudeta berdarah ini. Menurut Soekarno dalam Nawaksara, terdapat konspirasi antara unsur-unsur neokolonialisme dan imperialisme yang ingin menghambat revolusi negara Indonesia. Menurut Dake, dalang dari peristiwa tersebut adalah Soekarno sendiri²⁷. Sementara itu, menurut Brackman yang mengutip buku orde baru, PKI mendalangi kudeta tersebut dengan motif kekuasaan dan menyebarkan ideologi komunis di Indonesia²⁸. Menurut Scott dan Robinson, CIA turut campur tangan dalam usaha menjatuhkan Sukarno yang pro haluan kiri²⁹. Menurut Anderson dan McVey, ada kemungkinan peristiwa tersebut didalangi oleh Untung Syamsuri dari Tjakrabirawa yang bekerja sama dengan divisi Diponegoro dari Jawa Tengah yang menjunjung tinggi nilai budaya Jawa (sikap budaya politik absolut) untuk menurunkan para Jendral yang lebih pro gaya barat³⁰.

Pada masa orde baru, Suharto naik dan kekuatan militer memiliki pengaruh sangat besar dalam kursi pemerintahan. Suharto menumpas komunisme di tanah Indonesia, banyak orang meninggal secara misterius (operasi PETRUS). Media massa dicengkeram oleh pemerintah sehingga pemberitaan bersifat sangat subjektif, hanya memberitakan hal-hal baik mengenai pemerintah. Budaya politik pada masa ini adalah parokial-kaula karena mayoritas masyarakat tidak tahu menahu mengenai keburukan politik di Indonesia. Pada

²⁷ Antonie C.A. Dake, *The Sukarno File, 1965-1967* (Leiden : Koninklijke Brill NV, 2006), hlm. 315-

²⁸ Arnold C. Brackman, *Indonesian Communism: A History*, Canada: Praeger, 2012,312

²⁹ Peter Dale Scon, *The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967*(Berkeley; Pacific Affairs, 1985), hlm. 206-7.

³⁰ Benedict R. Q'G. Anderson and Ruth T. McVey, *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia*, (USA : Equinox Publishing, 2009), hlm. 54-5.

masa pemerintahan ini rakyat makmur, namun tidak kritis dan pihak yang menentang pemerintah dipaksa tunduk secara kasar.

Pada tahun 1998, pasca kejadian Tragedi Trisakti, Suharto turun akibat mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran dan menduduki gedung MPR. Mahasiswa yang merupakan kaum terpelajar, menjadi ujung tombak sekaligus korban dalam peristiwa reformasi tersebut. Mereka menunjukkan budaya politik partisipan (meskipun terdapat beberapa teori bahwa ada pihak tertentu yang menunggangi mahasiswa untuk menjatuhkan rezim Suharto) menentang pemerintah yang lilitan.

Budaya Politik Indonesia Masa Orde Reformasi

Pada era reformasi orang menyebut Indonesia telah menggunakan budaya politik partisipan karena telah bebasnya demokrasi, partisipatifnya masyarakat dan tidak tunduk dari keputusan atau kinerja pemerintah. Pada masa ini kepemimpinan Suharto jatuh ke tangan Habibie. Posisi Habibie sudah cukup sulit karena ia mewarisi sebuah pemerintahan yang sudah tidak populer karena krisis ekonomi di Asia dan dipengaruhi persepsi massa terhadap Suharto yang baru saja turun tahta. Popularitasnya akhirnya habis karena pecahnya Timor Timur dari Indonesia yang dianggap sebagai kesalahannya, disertai juga oleh skandal perbankan.

Gus Dur yang menggantikan Habibie juga mulai dari posisi yang kurang kuat karena partainya, PKB, bukan partai yang mendapat suara terbanyak dalam pemilu. Seharusnya Megawati lah yang menjadi presiden, namun budaya politik masyarakat masih memegang teguh prinsip paternalisme. Hal ini menyebabkan Gus Dur memiliki mandat politik yang kurang kuat berdasarkan teori kontrak sosial³¹. Sewaktu Gus Dur meresahkan kaum militer, maka reformasi pun terhambat Demikian pulanya dengan Megawati, usaha untuk menempatkan militer di bawah kontrol sipil secara penuh terhenti³².

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, masyarakat terpelajar, terutama di ibu kota, memiliki budaya politik partisipan. Akan tetapi, masyarakat yang kurang mendapat pendidikan mengenai politik dan masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat

³¹ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 237.

³² Bill Lidle, op. cit. hlm. 54.

pemerintahan masih memiliki budaya politik parokial-kaula, Pemerintah sudah bersifat toleran dan menerima kritikan dari masyarakat.

Pada masa pemerintahan Jokowi, terdapat perubahan yang sangat berarti pada budaya politik yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Seluruh system politik secara dinamis dan birokrasi satu pintu menjadi andalan dalam cabinet kerja. Pemerintah pun bersifat terbuka terhadap kritikan. Masyarakat menjadi lebih aktif dalam mengungkapkan pendapat dan masukan terhadap pemerintah. Tidak hanya masyarakat di Jakarta, melainkan di luar pulau juga. Sikap pemerintah dalam menerima masukan masyarakat pun tidak seperti orde baru, melainkan lebih terbuka.

Jadi, budaya politik Indonesia terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Menurut Rusadi (1988: 37 - 39), budaya politik Indonesia hingga dewasa ini belum banyak mengalami perubahan/pergeseran dan perpindahan yang berarti. Walaupun sistem politiknya sudah beberapa kali mengalami perubahan ditinjau dari pelembagaan formal, gambaran besar budaya politik di Indonesia masih sama. Saat ini budaya politik Indonesia adalah partisipatif pada kota besar dan pedesaan yang maju, namun masih parokial-kaula pada daerah-daerah terpencil dikarenakan kurangnya pendidikan dan informasi.

DINAMIKA SOSIALISASI BUDAYA POLITIK INDONESIA

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat dalam menjalani kehidupan politik. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara sengaja melalui kerkak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat³³.

Sosialisasi politik dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Pendidikan Politik

Suatu proses dialog antara pemberi dan penerima pesan, melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai, norma dan simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

³³ Aim Abdulkarim, op. cit. hlm. 5.

2. Indoktrinasi Politik

Proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa, melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis, dan latihan penuh disiplin. Partai politik dalam sistem politik totaliter melaksanakan fungsi indoktrinasi politik. Menurut M. Taopan, kesadaran politik merupakan proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan pentingnya urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara. Masyarakat harus mendukung pemerintah, mengingat kompleks dan beratnya beban yang harus dipikul para penyelenggara negara. Kesadaran politik dapat terwujud melalui sosialisasi politik³⁴.

Sosialisasi politik adalah proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai atau budaya politik ke dalam suatu masyarakat. Dari sudut masyarakat, sosialisasi politik adalah cara memelihara atau mengubah kebudayaan politik. Melalui sosialisasi politik, nilai-nilai politik ditanamkan kepada anak-anak sampai mereka dewasa dan kemudian direkrut untuk peranan politik tertentu.

Menurut Robert Le Vine terdapat tiga mekanisme pengembangan budaya politik, sebagai berikut³⁵.

- Imitasi, yakni proses sosialisasi melalui peniruan terhadap perilaku yang ditampilkan individu-individu lain. Sosialisasi pada masa kanak-kanak merupakan hal amat penting.
- Instruksi, yakni proses sosialisasi melalui pembelajaran formal, informal, maupun nonformal.
- Motivasi, yakni proses sosialisasi yang berkaitan dengan pengalaman individu.

³⁴ R. Siti Zuhro, *op.cit.* hlm. 11

³⁵ *Ibi.*, hlm. 12.

Menurut Robert Le Vine, sosialisasi politik di negara-negara berkembang cenderung mempunyai relasi lebih dekat kepada sistem-sistem lokal, kesukuan, etnis, dan regional daripada dengan sistem-sistem politik nasional³⁶. Masalah terberat yang dihadapi yaitu adanya berbagai macam kelompok dan tradisi di negara tersebut. Ada tiga faktor masalah penting dalam sosialisasi politik

pada masyarakat berkembang, yaitu³⁷ :

a. Pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang dapat melampaui kapasitas mereka untuk “memodernisasi” keluarga tradisional lewat industrialisasi dan pendidikan

b. Pendidikan dan nilai-nilai tradisional

Sering terdapat perbedaan yang besar dalam pendidikan dan nilai-nilai tradisional antara pria dan wanita, sehingga kaum wanita yang tidak mendapat pendidikan lebih erat terikat pada nilai tradisional.

c. Pengaruh urbanisasi

Kondisi penduduk di kota-desa yang sangat berbeda mempengaruhi nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Masyarakat kota cenderung lebih terpelajar, sementara masyarakat desa memegang erat nilai tradisional.

Sosialisasi politik dapat dilakukan dalam komunitas keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Adapun agen-agen Sosialisasi politik adalah keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, lingkungan kerja, media massa, dan partai politik.

Contoh peran aktif dalam kehidupan politik adalah sebagai berikut³⁸

- Lingkungan keluarga

Lingkungan keluarga menjadi agen yang pertama dalam memasyarakatkan Sosialisasi politik. Contoh Sosialisasi politik di keluarga : musyawarah keluarga,

³⁶ Adji Pratikto, *Pengaruh Budaya Terhadap Kinerja Perekonomian*, Portal Garuda, diakses dari <http://miftaclttblog.uns.ac.id/2010/01/sosialisasi-politik> pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 10.50.

³⁷ M. Solly Lubis, *Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1993), hlm. 14.

³⁸ R. Siti Zuhro, loc.cit.

pemasangan atribut kenegaraan pada hari besar nasional, membaca dan mengikuti berbagai berita di media massa dan media elektronik.

- Lingkungan sekolah

Sekolah merupakan agen penting bagi sosialisasi politik. Disini anak belajar mengenal budaya politik lebih luas dan belajar mengaplikasikan budaya politik yang mereka kenal. Contoh sosialisasi politik di sekolah : pemilihan ketua OSIS, pembuatan AD-ART dalam setiap organisasi yang diikuti, serta forum-forum diskusi atau musyawarah.

- Lingkungan masyarakat

Contoh sosialisasi politik di lingkungan masyarakat adalah partisipasi dalam forum warga, pemilihan ketua RT / RW.

- Lingkungan berbangsa dan bernegara Contoh sosialisasi politik di lingkungan berbangsa dan bernegara : menggunakan hak pilih dalam pemilu, menjadi anggota aktif dalam partai politik, serta ikut aksi unjuk rasa dengan damai.

Contoh sikap atau perbuatan yang demokratis dalam perbuatan sehari-hari adalah³⁹;

- Menghindari sikap angkuh, mau menang sendiri, mementingkan diri dan kelompok, adu kekuatan, keras kepala, ekstrem, dan meremehkan orang lain/kelompok.
- Membina dan membiasakan sikap perilaku demokratis, kekeluargaan, musyawarah, saling mengalah, toleransi, dan tenggang rasa.

Gabriel A. Almond mengemukakan pentingnya sosialisasi politik dalam pengembangan budaya politik sebagai berikut :⁴⁰

1. Membentuk kebudayaan politik suatu bangsa
2. Mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa
3. Memelihara kebudayaan politik suatu bangsa dalam bentuk penyampaian kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda
4. Mengubah kebudayaan politik

³⁹ Syahrial Syarbaini, *Pendidikan Pancasila* (Bogor: Ghaliia Indonesia, 2009), hlm. 34.

⁴⁰ Almond Gabriel. AdanSidney Verba, *Budaya Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 53.

Dalam suatu sistem politik negara, fungsi sosialisasi menunjukkan bahwa semua sistem politik cenderung berusaha mengekalkan budaya dan struktur mereka sepanjang waktu. Pada sisi lain, sosialisasi politik merupakan proses induksi ke dalam suatu budaya politik yang diinginkan.

Hasil akhir proses ini adalah seperangkat sikap mental, kognisi (pengetahuan), standar nilai-nilai dan perasaan-perasaan terhadap sistem politik dan aneka perannya serta peran yang berlaku. Hasil proses tersebut juga pengetahuan tentang nilai-nilai yang mempengaruhi, serta perasaan mengenai masukan tentang tuntutan dan *claim* terhadap sistem, dan *output otoritatif-nya*. Dalam proses sosialisasi politik kaitannya dengan fungsi komunikasi politik, berhubungan dengan struktur-struktur yang terlibat dalam sosialisasi serta gaya sosialisasi itu sendiri. Almond mengatakan bahwa sosialisasi politik bisa bersifat nyata (*manifes*) dan bisa pula tidak nyata (*laten*).

Tabel 2. Sosialisasi Politik Manifes dan Laten

Sosialisasi Politik Manifes	Sosialisasi Politik Laten
Berlangsung dalam bentuk transmisi informasi, nilai-nilai atau perasaan terhadap peran, input dan output sistem politik.	Dalam bentuk transmisi informasi, nilai-nilai atau perasaan terhadap peran, input dan output mengenai sistem sosial yang lain seperti keluarga yang mempengaruhi sikap terhadap peran, input dan output sistem politik yang analog (adanya persamaan).

Kedewasaan masyarakat dalam berpolitik ditandai oleh tingkat pengetahuan yang tinggi dan aktif terlibat dalam sistem politik. Dengan meningkatkan Sosialisasi budaya politik, diharapkan masyarakat Indonesia dapat berkembang menjadi masyarakat dengan budaya politik partisipan dengan moral baik.

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah dibahas dalam seluruh kajian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa budaya politik adalah suatu unsur yang memiliki peranan yang signifikan bagi warga negara. Hal ini dikarenakan budaya politik merupakan bagian dari suatu negara

dan masyarakatnya. Budaya politik membuat masyarakat terlibat dalam pembangunan politik dalam sebuah negara serta menciptakan kehidupan bermasyarakat yang rukun dan saling menghormati antar individu. Budaya politik berpengaruh dalam menekankan kesadaran masyarakat akan adanya pusat kekuasaan politik dalam masyarakat sehingga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan politik suatu negara. Terdapat tiga jenis budaya politik yaitu: parokial, kaula dan partisipan.

Pada budaya politik parokial, orang-orang tidak mengetahui tentang adanya politik atau pemerintahan - masyarakat biasanya tidak berminat, dan budaya politik ini apatis, berlingkup sempit, serta masyarakatnya cenderung sederhana dan kurang peduli terhadap politik. Budaya politik kaula merupakan budaya politik dimana masyarakat berminat dan tertarik terhadap sistem politik, namun pasif. Masyarakat menerima apa yang dibuat pejabat dan mematuhi undang-undang yang ada, tetapi tidak terlibat dalam politik. Budaya politik kaula, biasanya menerima dan menuruti yang datang dari pemerintah karena warga sadar dan tahu, tetapi hampir tidak ada yang memberi masukan - dengan kata lain, keterlibatan masyarakat rendah. Sementara itu, budaya politik partisipan adalah suatu budaya politik dimana masyarakat sadar dan berperan aktif dalam sebuah kegiatan politik.

Biasanya, masyarakat sadar dan tahu, serta terlibat dalam hal-hal berbau politik karena mereka tahu bagaimana menggunakan hak mereka dan bertanggung jawab. Jenis budaya politik yang diaplikasikan di Indonesia merupakan campuran dari ketiganya. Budaya politik juga harus gencar di sosialisasikan agar terwujudnya budaya politik yang aktif dan membangun dalam berkehidupan negara. Dimana, terdapat berbagai agen yang dapat mensosialisasikan budaya politik ini seperti keluarga, sekolah, lingkungan kerja, media massa, maupun partai politik. Sebagai negara yang berdaulat dan demokratis, budaya politik yang aktif merupakan perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, sehingga semua warga negara juga harus bersikap demokratis dalam mewujudkan kehidupan berbudaya politik yang baik. Karena seluruh suara masyarakat berpengaruh dalam kehidupan berpolitik negara.

Di Indonesia, budaya politik merupakan perwujudan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia, sebagai pedoman kegiatan berpolitik dalam negara. Aim Abdulkarim menyatukan kategori budaya parokial dan kaula sehingga terdapat dua macam budaya politik secara umum. Budaya politik Indonesia kerap mengalami perubahan seiring

dengan waktu. Namun, budaya politik Indonesia hingga dewasa ini belum banyak mengalami perubahan/pergeseran dan perpindahan yang berarti, meskipun sistem politiknya sudah beberapa kali mengalami perubahan. Saat ini budaya politik Indonesia adalah partisipatif pada kota besar dan pedesaan yang maju, namun masih parokial-kaula pada daerah-daerah terpencil dikarenakan kurangnya pendidikan dan informasi.

Diharapkan masyarakat Indonesia memiliki budaya politik yang bersikap toleransi dan bersifat terbuka untuk bekerja sama, dan kritis namun netral terhadap ide dan perbedaan serta bersikap akomodatif terhadap perubahan yaitu menerima perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Indonesia merupakan negara demokrasi dengan tetap menganut Pancasila dan prinsip bhinneka tunggal ika. Oleh sebab itu, masyarakat juga diharapkan untuk berbudaya politik yang aktif, namun tetap menaati Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi hukum dasar tertinggi di dalam negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aim, A. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT. Grafindo Media //Pratama. 2006.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya Urjuwan. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2009.
- Anderson, B.R, Language and Power, USA: Equinox Publishing. 2006.
- Anderson, B, Mc. Vey, RT. A. Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia. USA: Equinox Publishing. 2009.
- Brackman, AC. Indonesian Communism: A History. Canada: Praeger. 2012
- Churohman, M. Sosialisasi Politik. Available from:
<http://miftachr.blog.uns.ac.id/2010/01/sosialisasi-politik/> [Accessed 2nd December 2016].
- Dake, ACA. The Sukarno File, 1965-1967. Leiden: Koninklijke Brill NV. 2006.
- Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. 1996.
- Firmanzah. Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006.
- Gabriel, A, Verba, S. Budaya Politik. Jakarta: Bumi Aksara. 1990
- Legge, JD. Sukarno: Apolitical Biography. Singapore: Archipelagi Press. 2003.
- Lubis, MS. Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1993.
- Liddle, B. Dari Columbus Untuk Indonesia: 70 Tahun Professor Bill Liddle dari Murid dan Sahabat Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2008.
- Mardjono, H. Politik Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Magnis-Suseno, F. Etika Politik. Jakarta: Gramedia, 2001.

- Ndraha, T. Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2003
- Pratikto A. Pengaruh Budaya Terhadap Kinerja Perekonomian, Diakses dari <http://dovmioad.portalgaruda.org/article.php?article-14120&val=951> [diakses pada tanggal 3 Juni 2021]
- Sutrisno, M, Putranto, H. Teori-Teori Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius. /2005.
- Siti, RZ. Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, / dan Bali. Ombak: Yogyakarta. 2009.
- Scott, PD. The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967. Barkeley: Pacific Affairs, 1985.
- Setiadi, EM. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta: Kencana, 2009.
- Suhelmi, A. Pemikiran Politik Barat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Syarbaini, S. Pendidikan Pancasila. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Yahya, M. Andrew, CM. Masalah-Masalah Pembangunan Politik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1995.